



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Analisis Hambatan Partisipasi Masyarakat pada Program  
Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan Menggunakan Model  
CLEAR (Studi Kasus: Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan  
Bojongloa Kidul, Kota Bandung)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Abieputra Nur Pahlavi

2015310034

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Analisis Hambatan Partisipasi Masyarakat pada Program  
Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan Menggunakan Model  
CLEAR (Studi Kasus: Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan  
Bojongloa Kidul, Kota Bandung)**

Skripsi

Oleh

Abieputra Nur Pahlavi

2015310034

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., M,PA

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Abieputra Nur Pahlavi  
Nomor Pokok : 2015310034  
Judul : Analisis Hambatan Partisipasi Masyarakat pada Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan Menggunakan Model CLEAR (Studi Kasus: Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 08 Januari 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Tutik Rachmawati Ph.D

**Sekretaris**

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA,

**Anggota**

Maria Rosarie Harnie Triastuti, S.IP., M.Si.

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abieputra Nur Pahlavi

NPM : 2015310034

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Hambatan Partisipasi masyarakat pada Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan menggunakan Model CLEAR Studi Kasus: Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Ada pun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Desember 2019

  
Abieputra Nur Pahlavi

METERAI  
TEMPEL  
20  
2019  
AHE186074527  
5000  
RIBURUPIAH

## ABSTRAK

Nama : Abieputra Nur Pahlavi  
NPM : 2015310034  
Judul : “Analisis Hambatan Partisipasi Masyarakat pada Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dengan menggunakan Model CLEAR (Studi Kasus: Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung)”

---

Perumahan merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2017, Pemerintah meluncurkan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi membangun dan memperbaiki huniannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program tersebut terdapat indikasi masalah berupa adanya kendala komunikasi antar aktor dan keterbatasan swadaya masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam program. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan model CLEAR dengan beberapa variabel yaitu (1) *Can do*, (2) *Like to*, (3) *Enabled to*, (4) *Asked to*, dan (5) *Responded to*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe studi kasus yaitu Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Wawancara dengan 10 informan yang terdiri dari pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, sekretaris Kelurahan Mekarwangi, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), partisipan program, warga non-partisipan program 2) Studi dokumen yang digunakan untuk penelitian meliputi petunjuk teknis dan laporan akhir Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu tahun 2019 dan 3) Observasi aktifitas masyarakat meliputi partisipasi pada program.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan variabel *Can do*, terdapat hambatan partisipasi masyarakat pada ketersediaan swadaya (2) Berdasarkan variabel *Like to*, masyarakat melakukan partisipasi atas dasar ikatan kekerabatan (3) berdasarkan variabel *Enabled to*, terdapat hambatan komunikasi antara partisipan dengan BKM karena organisasi tersebut memiliki prioritas pekerjaan lainnya (4) Pada variabel *Asked to*, terdapat unsur nepotisme antar sesama partisipan pada tahap pelaksanaan, (5) Pada variabel *Responded to*, ditemukan fenomena bahwa pihak kelurahan tidak berpartisipasi dalam program sesuai dengan petunjuk teknis karena pelaksanaan program sepenuhnya diserahkan pada BKM.

Kata Kunci: Hambatan Partisipasi, Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, Analisis Model CLEAR

## **ABSTRACT**

Name : Abieputra Nur Pahlavi  
NPM : 2015310034  
Title : *"Obstacle Analysis at Community Participation in the Rutilahu Social Rehabilitation Program using the CLEAR Model (Case Study: Mekarwangi Town, Bojongloa Kidul District, Bandung City)"*

---

*Housing is a primary need for every citizen and is the responsibility of the state in meeting the basic needs of the community. Through Minister of Social Affairs Regulation No. 20 of 2017, the Government launched the Social Rehabilitation Program for Non-Occupable Homes (Rutilahu) which aims to build community awareness in participating in building and improving occupancy. However, in the implementation of the program there are indications of problems in the form of communication constraints between actors and the limitations of community self-help related to community participation in the program. To answer the research question, CLEAR model is used with several variables, namely (1) Can do, (2) Like to, (3) Enabled to, (4) Asked to, and (5) Responded to.*

*This study used a qualitative case study type method, in Mekarwangi Village, Bojongloa Kidul District. The research techniques used in this study were 1) Interviews with 10 informants consisting of employees of the Department of Housing and Settlement, Land, and Parks (DPKP3) of Bandung City, secretaries of Mekarwangi Urban Village, Community Self-Reliance Agency (BKM), program participants, non-residents program participants 2) Study documents used for research include technical guidelines and the final report of the Rutilahu Social Rehabilitation Program in 2019 and 3) Observation of community activities including participation in the program.*

*The results of this study indicate that (1) based on the Can do variable, there are obstacles to community participation in the availability of self-support (2) Based on the Like to variable, the community participates on the basis of kinship ties (3) based on the Enabled to variable, there are communication barriers between participants and BKM because the organization has other work priorities (4) In the Asked to variable, there is an element of nepotism among fellow participants at the implementation stage, (5) In the Responded to variable, it is found that the village does not participate in the program according to the technical instructions because the program is fully implemented submitted to BKM.*

*Keywords: Participation Obstacle, Rutilahu Social Rehabilitation Program, CLEAR model analysis*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Hambatan Partisipasi Masyarakat pada Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu Studi Kasus: Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan, Bojongloa Kidul, Kota Bandung,*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, adapun hambatan dan rintangan yang penulis alami namun berkat adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara spiritual, moril, dan materil. Untuk itu penulis menyampaikan amat terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang paling utama, karena melalui restu dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada keluarga penulis (Risma Ariantina, Kriswandono, Yasmine, dan Bimanto) dan segenap keluarga peneliti yang memberikan dukungan secara spiritual, moril, dan materil.
3. Terimakasih Kepada Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah sabar membimbing peneliti dengan segala kekurangannya dan berkat bimbingannya penulis dapat menuntaskan penelitian ini.

4. Terimakasih kepada Ibu Tutik Rachmawati Ph.D selaku ketua sidang dan Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. selaku penguji
5. Terimakasih pada segenap Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik Unpar yang memberikan bekal ilmu pengetahuan selama proses di perkuliahan.
6. Terimakasih kepada Bapak Iwan selaku Ketua BKM beserta keanggotaannya yang memberikan dukungan data pada penelitian ini
7. Terimakasih kepada Lurah beserta perangkatnya untuk memberikan izin penelitian di Kelurahan Mekarwangi
8. Terimakasih kepada partisipan dan warga di Kelurahan Mekarwangi yang memberikan dukungan data penelitian
9. Terimakasih kepada segenap pegawai DPKP3 yang memberikan bantuan pada data pada proses pra penelitian
10. Terimakasih kepada rekan-rekan Mbahkuning yang memberikan dukungan moril pada penulis
11. Terimakasih kepada rekan-rekan Program Ilmu Administrasi Publik lainnya

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki kekurangan baik dalam isinya maupun penataannya. Harapan peneliti, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, serta dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian kedepannya. Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan bagi yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Fokus Penelitian.....	10
1.3    Tujuan Penelitian .....	11
1.4    Kegunaan Penelitian .....	11
1.4.1    Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2    Manfaat Praktis .....	11
1.5    Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1    Program di Sektor Publik.....	13

2.2	Partisipasi Program .....	14
2.3	Analisis Hambatan Partisipasi Program dengan Model CLEAR .....	15
<b>BAB III.....</b>		<b>21</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>		<b>21</b>
3.1	Metode Penelitian .....	21
3.2	Tipe Penelitian .....	22
3.3	Lokasi Penelitian.....	22
3.4	Sumber Data.....	23
3.4.1	Jenis Data.....	23
3.4.2	Teknik Memperoleh Data .....	24
3.5	Prosedur Pengumpulan Data.....	25
3.5.1	Observasi .....	25
3.5.2	Studi Dokumentasi.....	26
3.5.3	Wawancara.....	26
3.6	Analisis Data.....	27
3.7	Operasional Variabel .....	30
<b>BAB IV .....</b>		<b>32</b>
<b>PROFIL PENELITIAN.....</b>		<b>32</b>
4.1	Program Rehabilitasi Rutilahu.....	32
4.2	Istilah-istilah yang digunakan .....	34

4.2.1	Stimulan .....	34
4.2.2	Bantuan stimulan.....	34
4.2.3	Partisipatif.....	35
4.2.4	Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) .....	35
4.2.5	Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu/RTLH) .....	35
4.2.6	Kemiskinan .....	35
4.2.7	Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) .....	36
4.2.8	Swadaya Masyarakat .....	36
4.2.9	Mandor.....	36
4.2.10	Tukang .....	36
4.2.11	Konsultan Manajemen Kota .....	37
4.2.12	Fasilitator .....	37
4.3	Tujuan Program.....	37
4.4	Komponen Kegiatan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung .....	38
4.5	Tahap Perencanaan.....	38
4.6	Syarat Penerima Manfaat.....	39
4.7	Klasifikasi Perbaikan Rutilahu .....	40
4.8	Tahap Persiapan .....	42
4.9	Tahap Pelaksanaan .....	43

4.10	Tahap Akhir Pelaksanaan.....	45
4.11	Struktur Organisasi BKM di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul.....	46
<b>BAB V.....</b>		<b>47</b>
<b>ANALISIS DAN HASIL TEMUAN PENELITIAN.....</b>		<b>47</b>
5.1	Faktor Dapat Melakukan ( <i>Can Do</i> ).....	48
5.1.1	Kemampuan Partisipan Dalam Menyampaikan Aspirasi Data.....	48
5.1.2	Partisipan Mampu Mengajak Partisipan Lain Untuk Terlibat .....	50
5.1.3	Latar Belakang Pendidikan yang Dimiliki Partisipan.....	52
5.1.4	Ketersediaan Partisipan yang menyumbang (Tenaga Kerja, Uang, dan Bahan Bangunan) untuk Kebutuhan Program.....	54
5.2	Faktor <i>Like To</i> (Ingin Melakukan).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.1	Adanya Komitmen Bersama/ Rasa Keterikatan Antar Sesama Partisipan untuk Tetap Terlibat Dalam Program .....	57
5.2.2	Partisipan Merasa Menjadi Bagian Dari Program .....	58
5.3	Faktor <i>Enabled to</i> (Digunakan Untuk) .....	61
5.3.1	Ketersediaan Mekanisme Kelembagaan Bagi Partisipan Untuk Menyampaikan Aspirasi Masyarakat.....	61
5.4	Faktor <i>Asked to</i> (Diminta untuk).....	63
5.4.1	Partisipan Berpartisipasi Dikarenakan Adanya Permintaan Partisipan Lain Agar Terlibat Dalam Program .....	63

5.4.2	Partisipan Ingin Berpartisipasi Dikarenakan Adanya Imbalan yang Diberikan .....	65
5.4.3	Adanya Kondisi Tertentu yang Dialami Partisipan, Sehingga Mereka Tetap Terdorong Untuk Berpartisipasi Pada Program.....	67
5.5	Faktor <i>Responded to</i> (Di Tanggapi).....	68
5.5.1	Tanggapan Partisipan Ditindaklanjuti, Ditampung, atau Tidak Ditanggapi oleh Wakil Program (RT/RW/Lurah/BKM) .....	68
<b>BAB VI</b>	.....	<b>72</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	<b>72</b>
6.1	Kesimpulan .....	72
6.2	Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 .....	3
Tabel 1.2 Data Rencana dan Penanganan Program .....	8
Tabel 3.1 Operasional Variabel Model CLEAR .....	30
Tabel 4. 1 Aspek penilaian kerusakan .....	41

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Model Penelitian .....	20
Bagan 3.1 <i>Snowball Sampling</i> .....	25
Bagan 3.2 Analisis Data Kualitati .....	27
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BKM .....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Program Bantuan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat. Pada lampiran PMK Nomor 81 PMK.05/81/2012, bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yaitu dalam bentuk barang, uang, atau jasa.<sup>1</sup> Dalam hal ini, ketiga komponen yang disebutkan merupakan jenis bantuan yang diberikan. Jenis bantuan, diukur dari segi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk golongan masyarakat yang tidak mampu.

Ukuran masyarakat tidak mampu dapat dilihat pada Undang-undang No. 13 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) dan (3) Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada ayat (1) disebutkan bahwa, fakir miskin adalah orang tidak mempunyai mata pencaharian dan/ mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan pada ayat (3) kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.<sup>2</sup> Artinya ukuran masyarakat tidak mampu dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan ini, dalam mengimplementasikan suatu bantuan sosial, pemerintah memiliki dasar ukuran yang dapat ditinjau dari segi kebutuhan dasarnya.

---

<sup>1</sup> PMK Nomor 81 PMK.05/81/2012 Bentuk Bantuan Sosial

<sup>2</sup> Undang-undang No. 13 tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

Masyarakat berkondisi tidak mampu dapat diukur ketika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Dari ketujuh aspek yang disebutkan, rumah merupakan salah satu aspek kebutuhan dasar yang penting. Sebab, secara pengelihatannya fisik kondisi rumah yang ditinggali menentukan kelayakan hidup yang dijalani oleh masyarakat. Dengan ini, ketika rumah yang ditinggali berkondisi tidak layak untuk dihuni, dapat dikatakan masyarakat yang meninggalkannya tidak dapat memenuhi salah satu aspek kebutuhan dasar.

Dalam mengatasi kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemerintah membentuk program bantuan sosial tentang perbaikan kondisi rumah, melalui Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2017, tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu. Pada pasal 1 ayat (2), Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, dilaksanakan dengan asas “gotong royong.” Dimana, asas gotong royong melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program.<sup>3</sup>

Menanggapi isu seputar RTLH, Pemerintah Provinsi Jawa Barat nampaknya, cukup serius untuk membenahi permasalahan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada lampiran Berita Pikiran Rakyat mengenai, upaya Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil akan merehab seluruh RTLH di Provinsi Jawa Barat selama masa jabatannya. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 262,5 miliar rupiah, untuk merehabilitasi 15.000 unit RTLH.<sup>4</sup> Upaya Ridwan Kamil untuk menuntaskan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2017, tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu

<sup>4</sup> Novianti Nuraliyah, Pikiran Rakyat, 189.000 Rutilahu akan direhab selama masa kepemimpinan



RTLH pada Provinsi Jawa Barat terlihat cukup serius. Upaya serius dalam menangani RTLH, nampaknya Walikota Kota Bandung, Oded M. Danial memiliki kesepahaman yang sama untuk mengatasi permasalahan RTLH. Berdasarkan Berita DetikNews, Walikota Kota Bandung, Oded M. Danial, akan merehabilitasi 2.500 RTLH di tahun 2019. Kemudian, rencana Oded M. Danial kedepannya, mengusulkan untuk setiap tahunnya akan merehabilitasi 2.500 RTLH.<sup>5</sup>

Berdasarkan Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertamanan, dan Pertanahan (DPKP3), Pada Tahun 2018, Kota Bandung memiliki jumlah RTLH sebanyak 13.778 unit yang terdiri dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Berikut lampiran Data DPKP3, pada tahun 2018:<sup>6</sup>

**Tabel 1.1 Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan DPKP3 Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah RTLH
1	Bojongloa Kidul	1.532
2	Bojongloa Kaler	1.299
3	Ujung Berung	844
4	Batununggal	801
5	Regol	793
6	Cibiru	774
7	Bandung Kulon	682
8	Mandaljati	603
9	Astana Anyar	590
10	Kiara Condong	562

---

Ridwan Kamil, Sumber: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01318568/189000-rutilahu-di-jabar-akan-direhab-selama-kepemimpinan-ridwan-kamil>, diakses pada tanggal 03/12/2019, Pukul 20.53

<sup>5</sup> Tri Ispranoto, DetikNews, Pemkot Kota Bandung targetkan perbaikan 2.500 Rutilahu di tahun 2019, Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4395100/pemkot-bandung-targetkan-perbaikan-2500-rutilahu-di-2019>, diakses pada tanggal 03/12/2019, Pukul 21.15

<sup>6</sup> DPKP3 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan), Kota Bandung 2018

No	Kecamatan	Jumlah RTLH
11	Andir	518
12	Cicendo	508
13	Babakan Ciparay	474
14	Bandung Kidul	446
15	Cibeunying Kidul	436
16	Rancasari	368
17	Kordon	335
18	Cinambo	259
19	Arcamanik	254
20	Lengkong	220
21	Antapani	209
22	Gede Bage	204
23	Cibeunying Kaler	166
24	Panyileukan	165
25	Cidadap	163
26	Sumur Bandung	155
27	Coblong	149
28	Sukajadi	114
29	Bandung Wetan	78
30	Sukasari	77

*Sumber: Data DPKP3 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan), Kota Bandung Tahun 2018*

Dari tabel 1.1 secara keseluruhan, RTLH di Kota Bandung masih tergolong banyak. Jumlah itu dapat dipahami bahwa, sebagian dari masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dari segi perumahan. Dengan melihat kondisi pada Tabel 1.1 dapat dipahami bahwa, sebagian dari masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dapat digolongkan sebagai masyarakat yang tidak mampu. Upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi persoalan masyarakat yang tidak mampu dari segi RTLH, yaitu dengan membentuk sebuah program perbaikan perumahan.

Di Kota Bandung Pemerintah membentuk program perbaikan perumahan untuk mengatasi permasalahan RTLH. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung, melalui DPKP3 untuk mengatasi persoalan RTLH di Kota Bandung. Sebab program ini

dilaksanakan dengan memberikan sejumlah bantuan yang sifatnya stimulan kepada masyarakat. Bantuan stimulan yaitu, sebagai rangasangan untuk masyarakat agar berpartisipasi pada suatu program.

Namun dari itu, Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu nampaknya memiliki sejumlah kendala pada tahap pelaksanaannya. **Indikasi yang diperoleh peneliti dapat dibuktikan dari data sekunder** yang diperoleh pada laporan akhir Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang disusun oleh tim konsultan manajemen Kota Bandung di tahun 2019, tentang persoalan krusial yang terjadi di lapangan yaitu:

1. RT/RW/BKM menganggap Program Rehabilitasi Rutilahu menyulitkan mereka, alasannya yaitu sibuk dan menjadi sasaran yang ditanyakan warga yang tidak lolos Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL).
2. CPCL menolak untuk memberikan swadaya kepada masyarakat, karena terdapat sejumlah masalah yang terjadi pada tahun lalu, kemudian CPCL menganggap program ini tidak sebanding dengan kerepotannya.
3. Permasalahan masyarakat atas kepemilikan tanah/rumah. Mereka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan
4. Jarak antara waktu dan pelaksanaan fisik lama, sehingga BKM/Kelurahan menjadi sasaran pertanyaan masyarakat

Poin-poin yang disebutkan pada persoalan krusial yang disusun oleh Tim Konsultan Manajemen Kota Bandung, merupakan gambaran secara umum tentang hambatan yang terjadi pada tahap pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial

Rutilahu, di Kota Bandung. Secara khususnya, kendala pada tahap pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, terletak pada tahap partisipasi masyarakat. Indikasi hambatan partisipasi masyarakat, dapat dibuktikan dari keterangan yang diperoleh peneliti ketika mewawancarai beberapa pegawai DPKP3 pada tahap pra penelitian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa, hambatan yang terjadi terletak pada partisipasi masyarakatnya, berikut hasil wawancara peneliti:

Wawancara dengan Pegawai DPKP3 (Pelaksana Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu):

*“Karena saya bagian pelaksana, jadi kalau bagaimana pelaksanaan partisipasi saya, itu urusannya bagian perencanaan program. Kalau saya lebih mengukur dari sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program. Kalau kendala program Rutilahu ya terjadi diseluruh dan hampir disetiap kelurahan. Nah kebanyakan disini kan kebanyakan masyarakat kurang mampu. Permasalahan yang terjadi .Pertama, Stigma masyarakat terhadap program ya mereka memiliki skala prioritas yang berbeda karena mereka memiliki pekerjaan yang padat. Kalau kedua, sering kali masyarakat menganggap program ini sebagai program bedah rumah. Kemudian yang ketiga yaitu, sering kali CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) tidak memiliki sertifikat tanah, tetapi kekeh ingin mengikuti program. Padahal program ini kan dasarnya bantuan stimulan yang mengacu partisipasi masyarakat mas.”<sup>7</sup>*

Wawancara dengan Pegawai DPKP3 (Pelaksana Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu):

*“Nah konsep Program Rehabilitasi Rutilahu sendiri kan ketika direnovasi masih terdapat sisa ruangan yang dapat ditinggali sementara oleh penghuni. Namun, ada kasus masyarakat malah mengontrak rumah. Padahal kan, alokasi uangnya bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan seperti bata, sak semen, dan peralatan lainnya. Nah kendala yang sering melanda program Rehabilitasi Rutilahu itu masyarakat*

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan pegawai DPKP3, bagian pelaksana Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, Tanggal 10/Okt/2019, Pukul: 14.00, Di Kantor DPKP3 (Dinas Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan, Kota Bandung)

*tidak sanggup secara swadaya dan masyarakat menganggap program ini masih kaya bedah rumah, padahal kita sudah berulang kali menyampaikan asas program Rutilahu itu bantuan stimulan.”<sup>8</sup>*

Kedua pernyataan yang disebutkan oleh dua pegawai DPKP3, menunjukkan dua indikasi utama yang kaitannya dengan hambatan partisipasi. Pertama yaitu kaitannya dengan keterbatasan swadaya masyarakat, sebab pada partisipasi Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, swadaya masyarakat merupakan salah satu bagian yang penting dari Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, yang tujuannya untuk merangsang bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah. Kedua yaitu, adanya kesalahpahaman konsep yang diterima oleh partisipan sebab, sebagian dari masyarakat memiliki anggapan bahwa, Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu seperti program bedah rumah, artinya masyarakat masih belum memahami konsep dari program yang memiliki asas gotong royong. Kondisi seperti ini dapat diindikasikan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak BKM/RT/RW kepada masyarakat tentang pengertian Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu. Sehingga masyarakat tidak memahami konsep partisipasi masyarakat pada Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

Seperti yang dilampirkan pada Tabel 1.1 tentang data jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2018, jumlah RTLH terbanyak berada pada Kecamatan Bojongloa Kidul. Pada data Laporan Akhir Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu tahun 2019, Kecamatan Bojongloa Kidul sebagai penerima bantuan terbanyak di

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan pegawai DPKP3, bagian pelaksana Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, Tanggal 10/Okt/2019, Pukul: 14.35, Di Kantor DPKP3 (Dinas Perumahan dan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan, Kota Bandung)

Kota Bandung. Hal ini dapat dibuktikan dari total penerimaan RTLH pada Kecamatan Bojongloa Kidul, berikut lampiran data yang disajikan:<sup>9</sup>

**Tabel 1.2 Data Rencana dan Penanganan Program Rehabilitasi tahun 2019 di Kecamatan Bojongloa Kidul**

No.	Kelurahan	Rencana Penanganan 2019 (Unit)			Realisasi Penanganan 2019 (Unit)		
		APBD	Bangub	DAK	APBD	Bangub	DAK
1.	Situsauer	114	-	-	138	-	-
2.	Kebonlega	159	-	-	163	-	-
3.	Cibaduyut	63	-	-	63	-	-
4.	Mekarwangi	-	160	-	-	191	-
5.	Cibaduyut Kidul	-	168	-	-	155	-
6.	Cibaduyut Wetan	-	265	-	-	171	-
Total:		Rencana: 929			Realisasi: 881		

*Sumber: Laporan Akhir tahun 2019, Tim Konsultan Perencanaan Program Rehabilitasi Rutilahu*

Data diatas merupakan Rencana dan Penanganan RTLH di Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Mekanisme anggaran untuk Program Rehabilitasi Rutilahu, terdiri dari tiga sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan Gubernur (Bangub), dan Dana Alokasi Khusus DAK. Dari keenam kelurahan yang disebutkan, terdapat tiga kelurahan yang menggunakan alokasi anggaran bersumber dari Bantuan Gubernur yaitu, Kelurahan Mekarwangi, Cibaduyut Kidul, dan Cibaduyut Wetan. Lalu, sisanya sumber anggarannya berasal dari APBD yaitu, Kelurahan Situsauer, Kebon lega, dan Cibaduyut.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Program Rutilahu, Untuk mekanisme anggaran program, umumnya menggunakan APBD Kota/ Kabupaten.

<sup>9</sup> Tim Konsultan Perencanaan Program Rehabilitasi Rutilahu tahun 2019, Laporan Akhir Program Rehabilitasi Rutilahu tahun 2019, (Bandung: Tim Konsultan Perencanaan Program Rehabilitasi Rutilahu, 2019), Hlm IV-9

Namun, terdapat kondisi tertentu sehingga mekanisme anggaran diselenggarakan dengan alokasinya dengan menggunakan Bangub. Menurut Ridwan Kamil dalam Berita Suara.com, terdapat tiga indikator suatu wilayah mendapatkan Bantuan Gubernur, berikut pernyataannya:

*“Pertama, kaitannya dengan pemerataan, yakni bantuan yang diberikan berdasarkan kondisi kabupaten/kota, jumlah penduduk, jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah, dan luas wilayah. Kedua, Indikatornya diukur berdasarkan performa suatu kabupaten/kota dalam menyukseskan program-program di Jawa Barat. Ketiga, Indikator ini menjadi pegangan Pemdaprov Jabar dalam menyalurkan bantuan keuangan.”<sup>10</sup>*

Dapat dipahami Bantuan Gubernur, yang di alokasikan pada suatu program dikarenakan tingkat kesulitan suatu wilayah yaitu, karena jumlah penduduk, luas wilayah, dan kontribusi PAD yang diberikan. Seperti yang diketahui, dari keenam kelurahan yang disebutkan, Kecamatan Bojongloa Kidul menempati peringkat pertama dengan realisasi penanganan terbanyak di tahun 2019. Seperti yang diketahui daerah dengan RTLH terbanyak berada pada Kecamatan Bojongloa Kidul. Apabila, mengacu pada tiga indikator yang disebutkan bahwa, komponen suatu daerah berhak mendapatkan Bantuan Gubernur, dikarenakan tingkat kesulitan suatu wilayah yaitu, luas wilayah, jumlah penduduk, dan Kontribusi PAD. Dengan ini peneliti berindikasi, bahwa Kelurahan Mekarwangi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sehingga, skala prioritas dari Bantuan Gubernur, yang dialokasikan pada Program Rehabilitasi Rutilahu, pada Kecamatan Bojongloa Kidul, difokuskan pada Kelurahan Mekarwangi pada tahun 2019.

---

<sup>10</sup> Febrianastri dan Hapsari, Suara.com, Ini 3 indikator Jabar dalam pemberian bantuan keuangan, Sumber: <https://www.suara.com/bisnis/2019/09/27/111527/ini-3-indikator-jabar-dalam-pemberian-bantuan-keuangan>, diakses pada tanggal 10/Nov/2019, Pukul 23.45

Seperti yang dilampirkan pada Tabel 1.3 bahwa, Kelurahan Mekarwangi merupakan wilayah dengan penerima bantuan terbanyak pada Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu. Kemudian juga berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis bahwa, Program Rehabilitasi Rutilahu dilaksanakan pada wilayah tingkat kelurahan. Selain itu, bahwa Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, menggunakan asas gotong royong yang merucut pada partisipasi masyarakat. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam, tentang mekanisme masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi, pada Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Dengan ini peneliti melakukan penelitian terhadap **“Hambatan Partisipasi Masyarakat pada Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu, di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah, fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan partisipasi masyarakat terhadap Program Rehabilitasi Rutilahu, di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Fokus penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan partisipasi yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung pada Program Rehabilitasi Rutilahu?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan berbagai hambatan partisipasi masyarakat yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung Bandung dalam Program Rehabilitasi Rutilahu.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat dua kegunaan yang didapat baik secara teoritis maupun secara praktis, berikut jabarannya:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain, untuk menganalisis hambatan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang dijalankan oleh pemerintah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertamanan, dan Pertanahan (DPKP3), Kota Bandung untuk menilai dan mengelola hambatan partisipasi masyarakat, pada Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

BAB I PENDAHULUAN, membahas perihal Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, membahas perihal Program Publik, Partisipasi Program, dan Analisis Hambatan Program.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas perihal Metode Penelitian, Tipe Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Validitas, dan Analisis Data.

BAB IV PROFIL PENELITIAN, membahas perihal Program Rehabilitasi Rutilahu, Istilah Yang Digunakan, Tujuan Program, Komponen Kegiatan Program Rehabilitasi Rutilahu, Tahap Perencanaan, Syarat Penerima Manfaat, Klasifikasi Perbaikan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Akhir Pelaksanaan, dan Struktur Organisasi BKM di Kelurahan Mekarwangi.

BAB V ANALISIS DAN HASIL TEMUAN, membahas perihal Faktor *Can Do* (Dapat Melakukan), Faktor *Like To* (Ingin Melakukan), Faktor *Enabled To* (Difungsikan untuk), Faktor *Asked To* (Diminta untuk), dan Faktor *Responded To* Ditanggapi untuk.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, membahas perihal Kesimpulan dan Saran .